

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan diterbitkan Undang-undang mengenai industri perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip Bagi Hasil yang dilakukan Oleh BMI (Bank Muamalat Indonesia)(Antonio, 2012;26).

Berjalannya waktu terhadap perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat. Beberapa kali pemerintah meregulasi Undang-Undang mengenai perbankan syariah yaitu UU No 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No 7 tahun 1992 mengenai Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah), kemudian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah.

Mengenai otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Serta Peraturan Bank Indonesia yang telah diperbaharui yaitu PBI Nomor 15/13/PBI/2013 mengenai dalam rangka untuk

meningkatkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Bank, meningkatkan efisiensi dan pengembangan industri perbankan syariah, dalam rangka penyalarsan ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan PBI No. 14/12/PBI/2012 tentang laporan kantor pusat bank umum(www.ojk.go.id).

Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pada gambar tabel 1.1 dibawah ini Perkembangan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Statistik Perbankan Syariah Di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah (BUS)				
1. jumlah bank	11	11	11	11
2. jumlah kantor	1.401	1.745	1.998	2.139
Unit Usaha Syariah				
1. UUS milik Bank Konvensional	24	24	23	23
2. Jumlah Kantor	336	517	590	425
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah				
1. Jumlah Bank	155	158	163	163
2. Jumlah kantor	364	401	402	425
Total Kantor	2.101	2.663	2.990	2.989

Sumber: Statistika Perbankan Syariah (SPS Juni 2014)

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat dalam jangka tahun 2011-2013 perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dalam memperluas usaha dan jaringannya. Pada tahun 2011 jumlah kantor yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 2.101 unit kantor hingga pertumbuhan 8 persen pada tahun 2014 menjadi 2.989 unit kantor.

Melihat perkembangan industri perbankan syariah diatas, saat ini pada perkembangannya industri perbankan syariah dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga keuangan Syariah Bank (LKSB) seperti Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan lembaga keuangan syariah bukan bank (LKSBB) seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), pegadaian Syariah, Asuransi Syariah (Takafful) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS).

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki dua fungsi dasar yaitu menghimpun kelebihan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan menjual produk-produk serta akad yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kegiatan operasional kegiatan LKS sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Berjalannya perkembangan industri perbankan syariah yang positif tidak hanya dilihat perkembangan di lembaga keuangan syariah bank saja melainkan disertai perkembangan di lembaga keuangan syariah bukan bank (LKSBB) salah satunya berkembangnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah serta sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dikarenakan BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang)

melainkan bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Ini merupakan bentuk konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu baitul maal wat tamwil yang berasal dari kata baitul maal dan bait at-tamwil. Secara singkat baitul maal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat tanpa tujuan profit dan sedangkan bait-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008).

Perbedaan BMT dengan bank umum syariah (BUS) atau dengan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah dalam bidang pendampingan dan dukungan. Berkaitan dengan bidang dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan peraturan pemerintah dibawah Departemen Keuangan atau peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan untuk BMT dengan badan hukum koperasi, secara otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha kecil Menengah. Dengan demikian peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen ini. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.9/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan penderian dan pengawasan BMT berada dibawah Departemen Koperasi Usaha Kecil dan menengah (2008:16).

Dewasa ini, BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikemas dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mewujudkan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang kuat. Melihat publikasi Departemen Koperasi Indonesia pada perkembangan terakhir data statistik tentang pertumbuhan UMKM pada tahun 2012 berjumlah 56.534.592 unit usaha dengan perkembangan 2,41% lebih baik dibandingkan pada tahun 2011 berjumlah 55.206.444 unit usaha. Dengan menyerap tenaga kerja pada tahun 2012 sebesar 107.657.509 orang angka ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya ditahun 2011 dengan pertumbuhan sebesar 5,83% atau berjumlah 101.722.45 orang yang mampu di serap dalam kegiatan UMKM. Dikarenakan target dan sasaran keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan ini memiliki pola kinerja yang erat dengan sektor usaha UMKM maka skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro.

Menurut data informasi Induk Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (INKOPSYAH BMT), jumlah BMT yang telah terdaftar menjadi anggotanya sebesar 385 anggota. Serta menurut data ABSINDO (Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil Seluruh Indonesia) jumlah BMT di Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 5.500 BMT. Serta dari informasi lain yaitu data statistik data departemen Koperasi Indonesia jumlah Koperasi di Indonesia terakhir yaitu tahun 2014 bulan juni termasuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) berada didalamnya dapat dilihat dalam tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jumlah Koperasi D.I Yogyakarta					
Tahun 2013			Tahun 2014		
Koperasi Unit					
Jumlah	Aktif	Tidak aktif	Jumlah	Aktif	Tidak aktif
2729	2172	557	2733	2176	557

Sumber : Data Statistik Departemen Koperasi Indonesia (Juni 2014)

Data statistik ini merupakan gambaran tentang perkembangan Koperasi ternasuk KJKS BMT didalamnya. dari tabel 1.2 diketahui bawah perkembangan koperasi di provinsi DIY berjumlah 2729 unit dengan koperasi yang aktif sebesar 2172 unit untuk ditahun 2013 sedangkan untuk ditahun 2014 jumlah koperasi yang aktif 2733 dengan koperasi yang aktif sebesar 2176 unit dan 557 untuk ditahun 2013 dan 2014 sebesar 557 unit angka yang tergolong yang cukup besar koperasi yang tidak aktif.

Menurut Sumiyanto, (2008) mengatakan bahwa begitu banyak BMT ini tidak dibarengin dengan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk terus berkembang dan bejalan dengan baik, fakta dilapangan menunjukan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan oleh berbagai macam sebab seperti; manajemmennya yang amburadul, pengelola yang tidak amanah, sumber daya manusia yang kurang mampu berkerja profesional, tidak dapat menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan seterusnya. Serta tidak jarang bahwa pendirian BMT kurang diimbangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang profesional mengenai manajemen pengelolaan, servis, maupun sumber daya manusia (SDM) Oleh karena itu banyak diantara BMT tersebut yang muncul kemudian mati dalam usia pendek atau tumbuh tetapi berdiri ditempat tidak bisa melangkah, dan sedikit yang dapat berjalan itupun dengan tertatih-tatih (Akbar, 2010).

Fakta yang ditemukan di lapangan mengenai menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan berbagai hal, antara lain karena manajemen yang kurang profesional, pengelola yang tidak amanah memunculkan ketidak

percayaan masyarakat sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran dan kesulitan modal (Santoso,2003;Akbar2010:5). Selain faktor internal yang telah disebutkan terdapat pula masalah ataupun tantangan yang berasal dari faktor eksternal seperti mengenai perkembangan BPRS yang semakin menguat dalam segi fasilitas pelayanan dan permodalan yang mengakibatkan bertambah sempitnya ruang gerak bagi BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, Mengingat perannya yang sangat besar di dalam mendorong usaha mikro keberadaan BMT mesti dijaga dan ditingkatkan kinerjanya. sehingga BMT dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai intermedator dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpun dana dari nasabahnya yang kelebihan dana kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat ekonomi rendah maupun kepada masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien.

Efektif itu sendiri memiliki arti sebagai ketepatan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan efisien lebih memiliki arti sebagai kesesuaian hasil antara *input* yang ada untuk digunakan dengan *output* maksimal yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan. Efisiensi juga diartikan bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia secara optimal untuk dapat menghasilkan *output* yang maksimal (Indarto,2010). Macflahatun (2010) mengatakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu: Pertama, apabila dengan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar; Kedua, *input* yang lebih kecil dapat

menghasilkan *output* yang sama; dan Ketiga, dengan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan *output* yang lebih besar lagi.

Adrian dan Etyy Puji Lestari (2009), Menambahkan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan. Pertama, Efisiensi karena abitrasi ekonomi. Kedua, Efisiensi karena ketepatan penilaian dasar aset-asetnya. Ketiga, Efisiensi karena lembaga keuangan bank mampu mengantisipasi resiko yang akan muncul dan keempat adalah efisiensi fungsional yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan.

Pengukuran kinerja efisiensi suatu lembaga keuangan menurut (Berger dan Humphery dalam Rahmawati, 2011) menyatakan bahwa dalam industri perbankan, untuk mengukur kinerja efisiensi, dikenal dengan dua pendekatan yang umum sering digunakan. Pendekatan Tradisional (*Traditional Approach*) dan pendekatan frontier (*Fontier Aprroach*). Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang membandingkan rasio-rasio yang ada di bank atau yang sering disebut dengan CAMEL biasa di kernal dengan pendekatan parsial. Sedangkan Pendekatan Fontier, Pendekatan yang di lakukan dengan menggunakan kombinasi aset tertentu (*output-input*) sebagai ukuran standar tertentu.

Pendekatan frontier sering digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi, pendekatan frontier ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu parametrik dan *non-parametrik*. Pendekatan parametrik melakukan pengukuran dengan menggunakan ekonometrik yang stokastik dan berusaha menghilangkan gangguan dari pengaruh ketidakefisienan. Metode parametrik meliputi *Stochastic Frontier*

Approach (SFA), *Thick Frontier Approach* (TFA), dan *Distribution Free Approach* (DFA). Metode Non-parametrik dengan program linier (*Non parametric Linear Progamming Approach*) melakukan pengukuran Non-parametrik dengan menggunakan pendekatan yang tidak stokastik dan cenderung mengkombinasikan gangguan dan ketidakefisienan Metode Non-parametrik meliputi *Free Disposal Hull* (FDH) dan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Perhitungan Parametrik dan Non-parametrik memiliki perbedaan, didalam Parametrik memasukan *Random Error* sedangkan *non-parametrik* tidak memasukan itu. Meskipun demikian, hasil yang ditunjukkan oleh kedua metode ini tidak jauh berbeda. Hal ini akan terjadi jika sampel yang dianalisis merupakan unit yang sama dan menggunakan proses produksi yang sama (Haddad *et al.*,2003).

Baitul Maal Wa Tamwil Beringharjo (BMT Beringharjo) merupakan salah satu berada di kota Yogyakarta, BMT Beringharjo berdiri pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan. Disisi lain, berdasarkan informasi dari situs webnya pada tahun 2013 BMT Beringharjo telah melayani anggotanya \pm 38.000 orang dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai intermediasi kepada masyarakat. Perkembangan keuangan BMT Beringharjo empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Perkembangan Keuangan BMT Beringharjo Periode 2010-2013

Variabel	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
1. Total asset	48.376.251.752	61.209.239.598	73.556.358.539	81.154.958.490
2. Total simpanan	38.489.457.454	47.467.400.118	59.434.864.044	73.526.891.610
3. Beban bagi hasil	4.318.750.578	5.332.569.475	6.220.362.126	6.267.330.596
4. Beban personalia	3.122.851.310	3.875.322.362	5.110.191.360	5.838.530.610
5. Total pembiayaan	34.045.547.664	40.901.961.054	47.954.341.387	60.335.783.518
6. Pendapatan operasional utama	9.137.743.524	11.218.430.926	13.572.446.442	14.718.899.952
7. Pendapatan operasional lainnya	420.394.840	447.103.024	524.600.596	590.989.686

Sumber : laporan Keuangan BMT Beringharjo diolah

Dari tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan keuangan BMT Beringharjo secara keseluruhan dilihat dari indikator perkembangan keuangan di atas. Menunjukkan bahwa dari tahun 2010-2013 mengalami kenaikan, diantaranya jumlah total asset, total simpanan, beban bagi hasil, beban personalia, total pembiayaan, pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, perlu adanya analisis dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja keuangan ataupun kinerja operasional untuk mengetahui perkembangan BMT lebih baik. Sehingga dibutuhkan evaluasi untuk mengukur nilai efisiensi kinerja pada BMT Beringharjo.

Dengan adanya evaluasi nilai efisiensi kinerja keuangan pada suatu lembaga keuangan dalam waktu periode tertentu. Maka akan memberikan nilai positif bagi lembaga keuangan diantaranya, menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi simpanan atau melakukan transaksi pinjaman. Sehingga, dengan semakin baik efisien kinerja operasional BMT Beringharjo akan menguntungkan untuk pihak nasabah dalam melakukan transaksinya dikarenakan

tingkat risiko yang kecil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat lebih banyak. Serta semakin baiknya tingkat efisiensi pada BMT biasanya semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tarif yang kompetitif. Sebaliknya, semakin tingkat efisien rendah maka kualitas pelayanan yang diberikan akan berkurang dan akan menetapkan tarif/biaya transaksi yang tinggi pula. Selain itu, adanya evaluasi terhadap efisiensi BMT Beringharjo ialah bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga profitabilitas bagi BMT.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan *searching gap* berhubungan dengan penelitian efisiensi kinerja keuangan pada lembaga keuangan syariah bank ataupun lembaga keuangan syariah bukan bank menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu :

M. Mahbubi Ali (2010). Meneliti tentang Efisiensi pada Baitul Maal Wat Tamwil Dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA) Kantor Cabang BMT MMU dan BMT UGT sidogiri 2005-2008. Dengan hasil BMT MMU dan BMT UGT secara keseluruhan relatif belum efisiensi terutama dari sisi *overall technical efficiency* serta Hasil pengolahan regresi tobit menunjukkan bahwa kekuatan modal dan ukuran BMT memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi *overall technical* BMT MMU dan BMT UGT.

Uma Uctavia (2013). Penelitian ini menerapkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada tingkat efisiensi bank umum Syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di indonesia dengan periode 2007-2011. Hasil analisis menggunakan metode DEA menunjukkan bahwa BUS dan UUS pada periode

2007-2011 cenderung mengalami peningkatan efisiensi meskipun fluktuatif dengan rata-rata efisiensi 93,09 % untuk BUS dan 97,31 % untuk UUS.

Perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah penerapan pada objek yang diteliti dan penambahan alat analisis yaitu pada penelitian Ali (2010) setelah menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). Peneliti menambahkan dengan Analisis Tobit sedangkan pada penelitian Uctavia (2013) selain menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) peneliti menambahkan pada pengujian hipotesis uji beda menggunakan independent sample *t-test* antara BUS dan UUS di Indonesia.

Dalam penelitian ini, memiliki perbedaan dari penelitian kedua penelitian diatas diantara, objek dan tahun yang diteliti yaitu BMT Beringharjo dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak efisiennya BMT Beringharjo selama periode 2010-2013.

Setelah melakukan *research gap* dari penelitian terdahulu. Maka Peneliti berminat untuk mengambil judul **“Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Studi Pada BMT Beringharjo Periode Tahun 2010-2013)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam menghadapi kemajuan zaman serta perkembangan atas kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BMT. Maka, efisensi terhadap kinerja keuangan BMT perlu diukur untuk dapat memberikan konsistensi

dalam memberikan pelayanan dalam melakukan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Disisi lain, agar mampu bersaing baik dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya ataupun seperti Unit usaha syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam memajukan ekonomi masyarakat kecil menengah.

Analisis kesehatan lembaga keuangan cenderung dengan menggunakan analisis rasio keuangan biasa yang digunakan seperti CAMEL tidak cukup untuk menggambarkan kesehatan keuangan. Sehingga, diperlukan untuk menganalisis variabel *input* dan *output* yang dapat mempengaruhi efisiensi kinerja BMT Beringharjo dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil Beringharjo (BMT Beringharjo) setelah diukur dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada periode tahun 2010-2013?
2. Apakah terdapat perbedaan nilai efisiensi Baitul Maal Wa Tamwil Beringharjo (BMT Beringharjo) setelah diukur dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada periode tahun 2010-2013?
3. Apa faktor-faktor penyebab ketidakefisienan di BMT Beringharjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis efisiensi kinerja pada Baitul Maal Wa Tamwil Beringharjo dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) (BMT Beringharjo) periode tahun 2010-2013.
2. Menjelaskan perbedaan nilai efisiensi kinerja pada Baitul Maal Wa Tamwil Beringharjo setelah diukur dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) (BMT Beringharjo) periode tahun 2010-2013.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi sumber-sumber ketidakefisienan di BMT Beringharjo.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, bermanfaat untuk mengetahui aplikasi teori-teori di bangku kuliah dan mengimplementasikan analisis efisiensi dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA) di BMT Beringharjo .
2. Bagi perusahaan, mengetahui kinerja keuangan berupa tingkat efisiensi yang kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan kedepan serta. Memberikan masukan kepada manajemen BMT Beringharjo agar dapat meningkatkan nilai efisiensi dalam operasional BMT Beringharjo.